



PERSEPSI DAN EKSPEKTASI PUBLIK TERHADAP BIROKRASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK

Oleh:

Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik &

Megister Administrasai Publik

Universitas Warmadewa

Denpasar

Pendahuluan



- ❖ Birokrasi pemerintahan selalu menjadi tema menarik untuk didiskusikan. Lebih-lebih lagi ditengah pandemi Covid 19 yang melada hampir seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia.
- ❖ Wabah Covid 19 berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, aspek sosial, ekonomi bahkan politik.
- ❖ Kehadiran birokrasi pemerintah dalam mengatasi musibah sangat dibutuhkan.
- ❖ Reformasi birokrasi khususnya dalam pelayanan publik diuji implementasinya;
- ❖ Apakah reformasi birokrasi yang digulirkan dapat menjawab multi-problematika tengah berlangsung?

APA BIROKRASI ITU ?



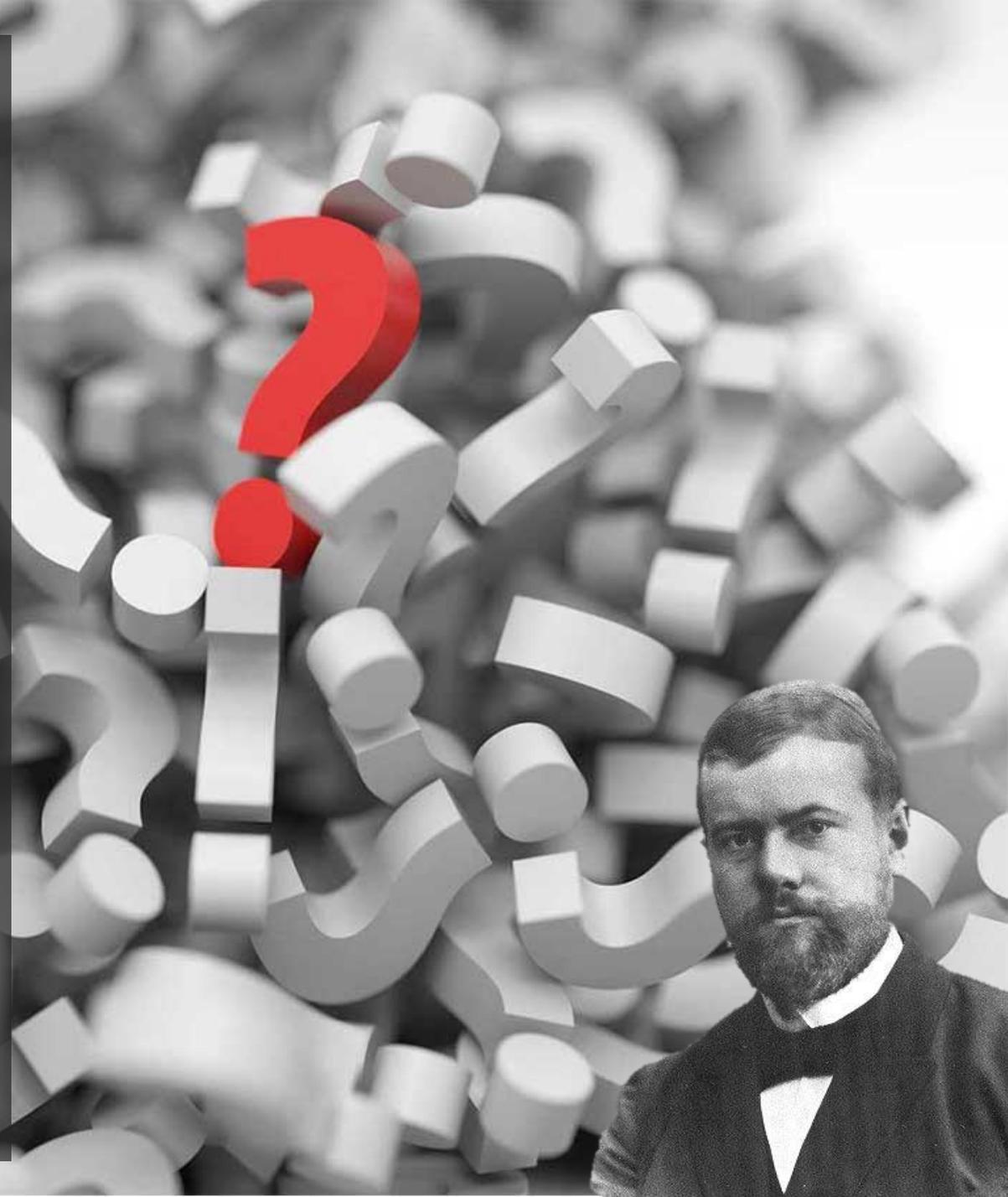
Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur,



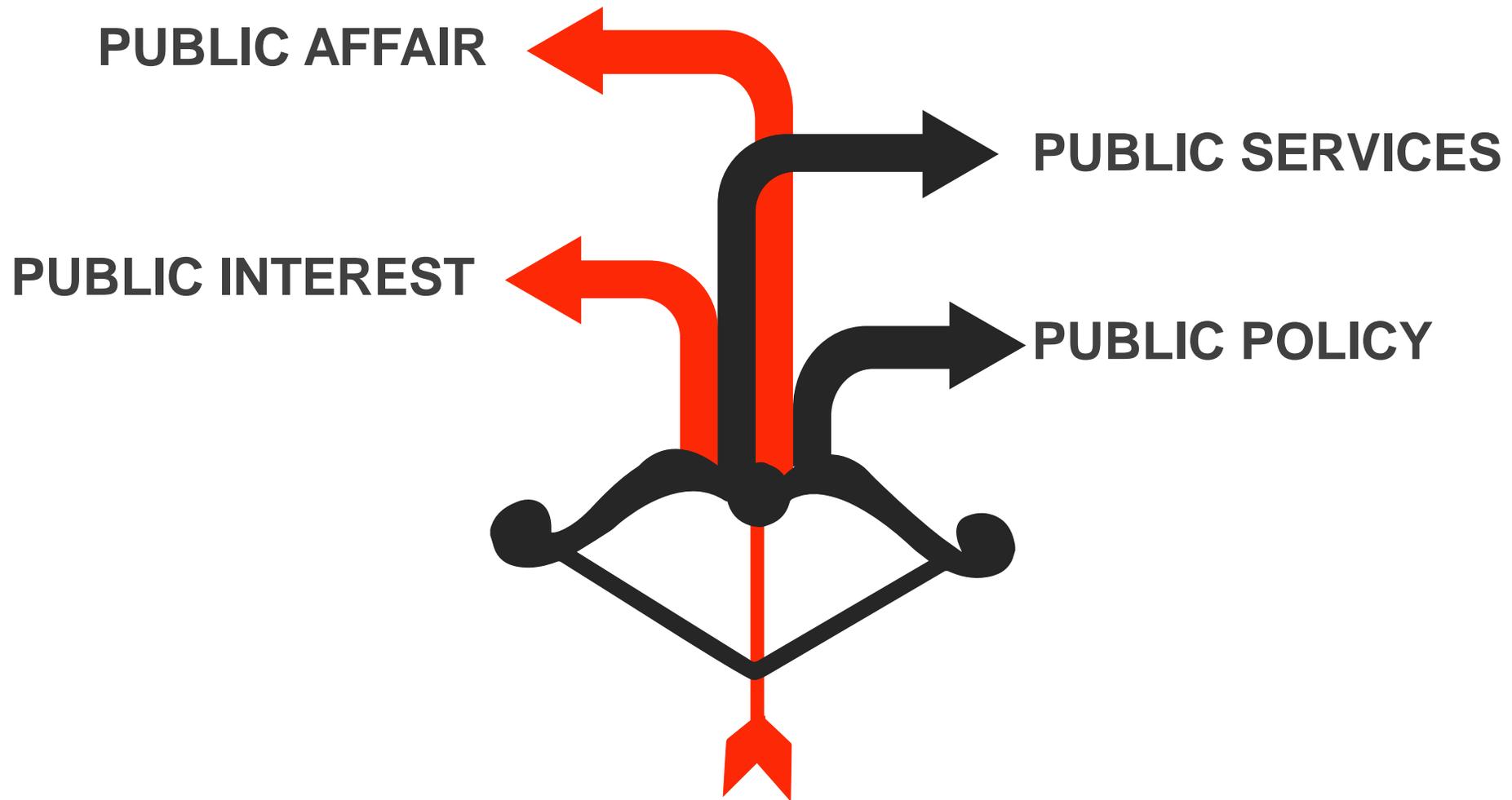
Tata kerja suatu organisasi yang berpegang teguh secara ketat pada hierarki dan peraturan (bureaucracy).”



“Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagi tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.”



Fungsi Birokrasi



PERAN BIROKRASI

Sejalan dengan
tujuan
pemerintahan

Melaksanakan
kegiatan dan
program demi
tercapainya visi dan
misi pemerintah
dan negara

Melayani
masyarakat dan
melaksanakan
pembangunan
dengan netral dan
profesional

Menjalankan
manajemen
pemerintahan, mulai
dari perencanaan,
pengawasan,
evaluasi, koordinasi,
sinkronisasi, represif,
prefentif, antisipatif,
resolusi, dll



PERSEPSI



- ❖ Birokrasi sering dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung “menyusahkan” masyarakat.
- ❖ birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif.
- ❖ Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
- ❖ Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kontradiktif dan Ambigu
- ❖ Sumber Daya Aparatur *Overstaffed* dan *Understaffed*
- ❖ Rekrutmen tidak obyektif, tidak transparan dan KKN
- ❖ Promosi Jabatan tertutup dan KKN
- ❖ Tingkat Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja
- ❖ Masalah Integritas
- ❖ *Business Process* dalam Pelayanan Publik
- ❖ Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti
- ❖ Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
- ❖ *Mindset* dan *Cultureset*
- ❖ Tidak *innovatif*, tidak memiliki semangat perubahan
- ❖ Sistem dan budaya kinerja belum terbangun

EKSPEKTASI

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pemerintahan yang terbuka dan berbasis ICT;

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Penataan kelembagaan

Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;

KISS antar kelembagaan



TERIMA KASIH